

**SKRIPSI**

**OTORITAS KESULTANAN YOGYAKARTA DALAM MEMPENGARUHI SISTEM  
PEMERINTAHAN DIY”**

(Study Deskriptif Kualitatif di Kraton Yogyakarta)



**Disusun Oleh:**

**Fredelis Irro Katia**

**11520071**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA  
“APMD” YOGYAKARTA  
2016**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**OTORITAS KESULTANAN YOGYAKARTA DALAM MEMPENGARUHI SISTEM  
PEMERINTAHAN DIY”**

(StudyDeskriptifKualitatif di Kraton Yogyakarta)



Dosen Pembimbing

Drs. Parwoto, M.Si

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA  
“APMD” YOGYAKARTA  
2016**

## **PENGESAHAN**

Skripsi ini sudah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 12 April 2016

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang ujian Skripsi STPMD”APMD” Yogyakarta

## **TIM PENGUJI**

NAMA

TANDA TANGAN

**Drs. Parwoto, M.Si**  
**Ketua/Penguji/Pembimbing**

\_\_\_\_\_

**Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si**  
**Penguji Samping I**

\_\_\_\_\_

**Drs. Triyanto Purnomo Raharjo.BE.,M.Si**  
**Penguji Samping II**

\_\_\_\_\_

**Mengetahui,**  
**Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan**

**Gregorius Sahdan S.IP, MA**

## HALAMAN MOTTO

- ❖ *Tuhan adalah terang kudankeselamatanku, Tuhan adalah benteng hidupku ( Mazmur 26,27 )*
- ❖ *Sekali kugagal bukan berarti aku tidak berhasil. Gagal itu salah satu hal penting, agar aku mengerti apa itu sukses.*
- ❖ *Keinginanyang kuat untuk meraih sukses dan ditentukan oleh besarnya impian dan kekuatan untuk mengatasi kekecewaan yang pernah di alami*
- ❖ *Semua akan indah pada waktunya, tergantung bagaimana kita menjalankan suatu tanggung jawab dengan benar dan sungguh-sungguh.*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

- ❖ *Terimakasih untuk Tuhan Yesus, Santo Yosep dan Bunda Maria atas berkat dan penyertaanNya dalam perjalanan Studiku, sehingga pada akhirnya saya bisa dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik*
- ❖ *Dari lubuk hati yang paing dalam saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tuaku, Bapak Adrianus A. Kaibu dan Mama Yustina Endomopyang telah bersusah payah membesarkan, merawat, menyayangi, dan membimbingku, memberikan saran dan motivasi serta mengasihiku dengan penuh doa dan cinta. Sehingga pada kesempatan yang bahagia ini dengan penuh rasa haru saya dapat menyelesaikan studi ini dengan gelar sarjana.*
- ❖ *Buat istriku tercinta, Adriana Toprip terima kasih kuucapkan karena engkau memberikan ku dukungan dan motivasi di saat aku jatuh dan di saat aku susah maupun senang. Engkau masih selalu setia bersamaku, engkau memberikan warna baru dalam hidupku. Tanpa dirimu aku tak bearti. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rahmat dan karuniaNya kepada kami. Amin*
- ❖ *Buat kedua anakku yang tercint, Karolus Kaisma dan Daud C Kaibu terima kasih kalian berdua telah hadir di dalam hidupku dan membawa inspirasi bagiku sehingga membuatku termotivasi untuk terus berjuang menyelesaikan studi ini dengan baik*

- ❖ *Terimakasih kepada Om guru ( Honoratus Kamitik ) yang selalumemberikan support, dan motivasi kepada saya baik moril maupun material .Semoga Tuhan selalumemberkati Om bersamakeluarga*
- ❖ *Untuk dosendanalmamatertercinta STPMD”APMD” Yogyakarta, terimakasih atas waktu dan ilmu yang sudah berikan kepada saya dan teman-teman, baik materi maupun pengalaman selama proses perkuliahan. Mulaidari tahun 2011 sampai dengan 2015*
- ❖ *Buat kelima saudara/iku Kaka Marten, adik Eki, Evi, Martadan Maria. Terimakasih atas dukungan doa, cinta, sertamotivasi yang diberikan kepada saya. Sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini dengan baik*
- ❖ *Buat keluarga besar saya terimakasih yang sebesar-besarnya atas dukungan kalian semua*
- ❖ *Terimakasih kepada Himpunan Pelajar dan Mahasiswa/i Mappi Yogyakarta ( HIPMAPIYA ) atas dukungan kerjasama, di dalam berbagai kegiatan organisasi. Terimakasih atas kebersamaan dan kekompakan yang sudah kita bangun. Dan dapat memberikan pengalaman-pengalaman hidup maupun pengetahuan kepada saya. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin.*

- ❖ *Tak lupajuga sayamengucapkanterimakasihkepadateman–  
temanangkatan2011danKeluargaBesarMahasiswa-  
MahasiswiSTPMD”APMD”Yogyakarta. Kalian adalahtemandanjuga guru  
bagiku,terimakasihuntuksemuanya.*
  
- ❖ *Buattemandansahabat,kaka Luis  
Wagatu,kakaBerli,kakaYeriEro,kakaYulianusEro,kakaFeraKloatubun,kaka  
Maxi Tokio,kaka Manu.  
ZobatMatiusUndagi,PetrusAsogome,RikiAnce,MaxiKaimu,EvanLahur,Mika  
elTekege,HendrikVergawen,FrerengkiKamagaimu,Tobias,NikoYermogoin,Osc  
ar Y, dansahabat yang lain yang  
sayatidaksempatsebutnamasatupersatu,terimakasihataskebersamaan yang  
sudakitabangunsertamasukandan saran yang suda kalian  
berikankepadasaya. Terimakasihuntuksemuanya.*

## **KATA PENGANTAR**

Penulis memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat dan kesempatan yang dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Otoritas Kesultanan Yogyakarta Dalam Mempengaruhi Sistem Pemerintahan Daerah istimewa Yogyakarta” dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dalam memperoleh gelar Strata Satu dari Prodi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, tidak mungkin bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas petunjuk dan bimbingan yang telah penulis terima selama melakukan penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Habib Muhsin, S.Sos., M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta;
2. Bapak Drs. Parwoto M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan masukan untuk penyelesaian skripsi ini dengan baik
3. Bapak Drs. Jaka Triwidayanta, M.Si selaku dosen pengujisatu yang sudah memberikan saran dan masukan kepada penulis



4. Bapak Drs. TriyantoPurnomoRaharjo.BE,M.Siselakudosenpengujidua yang sudamemberikanmasukandan saran kepadapenulis
5. Seluruh Dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta, April 2016

Penulis

Fredelis Irro Katia

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	x
Sinopsis.....	xiii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Teori.....	12
1. Otoritas Kesultanan Yogyakarta.....	12
1.1 Otoritas Kesultanan Yogyakarta dilihat dari aspek politik.....	18
1.2 Otoritas Kesultanan Yogyakarta dilihat dari aspek budaya.....	21
1.3 Otoritas Kesultanan Yogyakarta dilihat dari aspek ekonomi.....	25
1.4 Otoritas Kesultanan Yogyakarta dilihat dari aspek sosial.....	28
1.5 Otoritas Kesultanan Yogyakarta dilihat dari aspek psikologi.....	29
2. Dimensi Kekuasaan.....	34

3. Sistem Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.....	41
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	46
G. Metode Penelitian.....	47

## BAB II PROFIL KERATON YOGYAKARTA

A. Letak Geografis.....	51
B. Sejarah Berdirinya keraton Yogyakarta.....	52
C. Unsur-Unsur Bangunan Keraton Yogyakarta.....	57
D. Penduduk .....	62
E. Kepercayaan.....	63
F. Mata Pencaharian.....	63
G. Struktur Organisasi.....	64
H. Sarana dan Prasarana.....	65

## BAB III ANALISIS OTORITAS KESULTANAN YOGYAKARTA DALAM MEMPENGARUHI SISTEM PEMERINTAHAN DIY

A. Deskripsi Identitas Informan Secara Umum.....	68
B. Otoritas Kesultanan Yogyakarta dalam mempengaruhi sistem pemerintahan daerah istimewa yogyakarta	
1. Otoritas Kesultanan Yogyakarta dilihat dari aspek politik.....	71
2. Otoritas Kesultanan Yogyakarta dilihat dari aspek budaya.....	74
3. Otoritas Kesultanan Yogyakarta dilihat dari aspek ekonomi.....	76
4. Otoritas Kesultanan Yogyakarta dilihat dari aspek sosial.....	80
5. Otoritas Kesultanan Yogyakarta dilihat dari aspek Psikologi.....	82

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	89

Daftar Pustaka

## SINOPSIS

Berdasarkan Undang-Undang bahwa DIY adalah merupakan daerah otonom setingkat propinsi yang dikepalai oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Kepala Daerah DIY dan Sri Pakualam IX sebagai wakil Kepala Daerah DIY. Terkait dengan otoritas Kesultanan Yogyakarta dalam mempengaruhi sistem Pemerintahan di DIY, Sultan dan Kraton adalah roh dan pusat sosial budaya masyarakat Yogyakarta. Apa yang disampaikan atau yang diperintahkan oleh Sultan pasti akan dilaksanakan oleh warga masyarakat baik dalam bentuk kebijakan maupun perintah dalam bentuk sabda. Namun di sisi lain juga ada beberapa kebijakan maupun perintah dari Sultan sebagai Gubernur yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Sehingga terkadang perintah atau kebijakan tersebut diabaikan. Untuk itu maka peneliti ingin melakukan penelitian agar dapat mengetahui dampak dari Otoritas Kesultanan Yogyakarta dalam mempengaruhi Sistem Pemerintahan DIY. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ; Bagaimana Otoritas Kesultanan Yogyakarta dalam mempengaruhi system Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.?

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara 4 informan yang dianggap berkompeten untuk memberikan data. Baik dari pihak Kraton maupun Pemerintah dan dilengkapi dengan observasi lapangan oleh peneliti serta dokumen yang berkaitan dengan judul yang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otoritas Kesultanan Yogyakarta dilihat dari aspek politik ialah Interaksi yang terjadi ialah Sultan selalu membuat kebijakan politik dengan melakukan meditasi mistik dan Sultan masih mempengaruhi sistem politik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu bukti integrasi ialah lahirnya Undang-Undang nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Yogyakarta. karena Jogjakarta atau dulu yang dikenal dengan nama Mataram adalah sebuah kerajaan/negara yang notabene memiliki nilai historis bagi bangsa Indonesia dengan jasa yang dilakukan. Otoritas Kesultanan Yogyakarta dilihat dari aspek budaya ialah Bahwa interaksi yang terjadi pada semua masyarakat yang berada di Yogyakarta harus mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Keraton. Hal ini menunjukkan integrasi Sultan yang sesuai dengan peran keraton dalam ranah sosial dan budaya karena keraton adalah salah satu locus pendidikan budaya di mana nilai dan budaya mengalir ke bawah paling deras. Bahwa otoritas kesultanan dalam Yogyakarta dilihat dari aspek ekonomi, sehingga integrasi Sultan cukup mendominasi sehingga dikhawatirkan kota Yogyakarta mulai memudarkan nilai-nilai tradisi

yang sudah meletakkan terencana memudak karena banyaknya bangunan modern. Bahwa Otoritas Kesultanan Yogyakarta dilihat dari aspek sosial cukup banyak. Salah satunya interaksi sultan adalah dengan memberikan tanah (*Sultan Ground*) kepada masyarakatnya. Hal ini cukup berdampak positif kepada masyarakat kota Yogyakarta karena memiliki seorang sultan yang sangat dermawandan memiliki jiwa sosial yang tinggi yang memiliki jiwa integrasi yang sangat memperhatikan rakyatnya. Bahwa otoritas kesultanan Yogyakarta dilihat dari aspek psikologis yakni sebagai patron budaya sebenarnya mengakurath tidak masyarakat bawah. Sebagai institusi, integrasi kraton sebetulnya menjadi patron perubahan dalam masyarakat, termasuk orientasi pilihan politik. Hal tersebut menunjukkan integrasi yang dimiliki sultan.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

DIY merupakan daerah otonom setingkat provinsi yang dikepalai oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Kepala Daerah DIY dan Sri Paku Alam VIII sebagai Wakil Kepala Daerah DIY. Undang-undang yang membentuk DIY sebagai daerah otonom setingkat provinsi adalah Undang-Undang Nomor 3 jo 19 Tahun 1950.

Sumber hukum daripada DIY adalah Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”

Sebenarnya terbentuknya Kasultanan Yogyakarta dan daerah Paku Alaman menjadi DIY berdasarkan UUD 1945 itu melalui suatu proses. Dengan dikeluarkannya Amanat Kedua 30 Oktober 1945, proses pembentukan Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Paku Alaman menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan UUD 1945 itu sebenarnya sudah dimulai pembentukan Kasultanan Yogyakarta. Kemudian dibentuklah suatu Badan Pekerja yang bertugas menjalankan fungsi legislatif (pembuatan undang-undang) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Badan Pekerja inilah yang menjadi wakil rakyat diseluruh Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya diberi wewenang untuk menentukan haluan jalannya pemerintahan di

Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan untuk pertanggungjawabannya Badan Pekerja ini kepada KNI (Komite Nasional Indonesia) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Semenjak saat itu, segala dekrit yang dikeluarkan oleh Kasultanan dan Pakualaman juga ditandatangani oleh Badan Pekerja sebagai wakil persetujuan rakyat. Pada 18 Mei 1946, nama resmi Daerah Istimewa Yogyakarta mulai digunakan dalam setiap urusan pemerintahan yang menggabungkan dua kerajaan besar menjadi satu daerah istimewa dari Negara Indonesia. Sistem pemerintahan monarki persatuan ini masih terus berlaku sampai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengukuhkan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta ini merupakan bagian integral dari negara Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Pasal berikut,

“(1) Daerah yang meliputi daerah Kesultanan Yogyakarta dan daerah Paku Alaman ditetapkan menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2) Daerah Istimewa Yogyakarta adalah setingkat dengan provinsi.”

Terkait status istimewa yang dimiliki oleh DIY telah dilegalkan melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY. Pascatuntutan rakyat Yogyakarta yang menginginkan segera disahkannya Rancangan Undang-undang Keistimewaan DIY ini juga menetapkan bahwa Sultan dan Paku Alam adalah Kepala Daerah DIY. Setelah pengesahan Rancangan Undang-undang Keistimewaan DIY, Sri Sultan HB X mengeluarkan Surat Edaran Nomor 51/SE/IX/2012 yang berisi tentang penghapusan kata “provinsi” dari penyebutan nomenklatur (penamaan dalam bidang tertentu) SOPD (Satuan Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Daerah Istimewa Yogyakarta pada dasarnya

mempunyai dua bentuk pemerintahan, yaitu: pertama, merupakan bentuk pemerintahan kerajaan yang sesuai dengan keadaan budaya lokal. Kedua, bentuk pemerintahan daerah yang sesuai dengan sistem politik pemerintahan yang modern. Terkait penghapusan kata “provinsi” ini tentunya menimbulkan perubahan terhadap hubungan struktural dalam sistem pemerintahan.

Otoritas dalam kebudayaan Jawa bersumber dari wahyu Ilahi yang diberikan kepada orang-orang terpilih sehingga legitimasi dari otoritas tidak berasal dari rakyat yang dipimpin tetapi dari ranah supernatural. Dengan konsep otoritas seperti ini, otoritas seorang raja berakhir ketika wahyu Ilahi tersebut berpindah ke orang lain. Perpindahan wahyu ini bisa dilihat oleh rakyat jelata dari penurunan kepemimpinan atau kekalahan raja dalam peperangan. Untuk orang-orang dengan kemampuan spiritual tinggi, perpindahan otoritas ini bisa terlihat sebagai perpindahan *cahya* atau *teja* dari satu orang ke orang lain. Otoritas dalam kebudayaan Jawa tidak bisa dipertanyakan oleh rakyat.

Kekuasaan raja adalah kekuasaan absolut karena kekuasaan raja adalah tanggung jawab yang diberikan langsung oleh Tuhan melalui pemberian wahyu. Otoritas politik keraton dalam masyarakat Jawa tradisional meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat karena keraton adalah pusat dari kehidupan. Keraton adalah asal dari kehidupan itu sendiri sehingga pengaturan kehidupan diberikan seluruhnya kepada keraton. Aspek ini terlihat dari gelar penuh Sri Sultan Hamengkubuwono IX yaitu *Sampeyan dalem Inkgang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono, Senopati Ing Ngalogo, Abdurrahman Sayidin Panoto Gomo, Kalifatullah Inkgang Kaping IX*. Arti gelar yang panjang ini adalah dia adalah penguasa yang sah di dunia ini; dia juga *Senopati Ing Ngalogo*, yang berarti bahwa dia adalah panglima tertinggi, penentu perdamaian dan peperangan. Sultan juga disebut *Abdurrahman Sayidin*



*Panoto Gomo* yang berarti penata agama yang pemurah, sebab dia diakui sebagai *Kalifatullah*, pengganti Muhammad SAW (Soemardjan, 1962). Otoritas Sultan dalam masyarakat tradisional Yogyakarta terlegitimasi oleh budaya dan kultur masyarakat. Bagi masyarakat tradisional Yogyakarta, tiap kata Sultan adalah hukum karena Sultan bukan sekedar seseorang yang kebetulan memegang kekuasaan tetapi seseorang yang didukung oleh segenap kekuatan magis pusaka-pusaka kerajaan.

Adanya pemerintahan kolonial Belanda memperlemah otoritas keraton secara signifikan. Dalam pemerintahan kolonial Belanda, otoritas Sultan digunakan dalam pemerintahan masyarakat Yogyakarta dalam sistem yang dikenal sebagai *Indirect Rule*. Dalam sistem ini, sistem pemerintahan tradisional tetap dipertahankan tetapi status penguasa lokal berubah menjadi pegawai sipil yang mempunyai gelar dan atribut penguasa lokal. Pembuatan keputusan, dalam sistem ini, dibuat oleh Sultan untuk keputusan-keputusan yang bersifat budaya dan agama tetapi keputusan-keputusan yang menyangkut perdagangan dan keamanan dipegang oleh Belanda. Melalui Perjanjian Giyanti, keraton Yogyakarta juga menempatkan Pepatih Dalem, dengan persetujuan residen/gubernur menjadi pemegang kekuasaan sehari-hari yang sebenarnya, bukan di tangan sultan. Selain itu pemerintahan kolonial juga mempunyai aparat hukum beserta hukum perdata sendiri untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan orang Belanda. Keraton tidak mempunyai kekuatan untuk menangani perkara yang melibatkan orang Belanda.

Setelah kemerdekaan Indonesia, kekuasaan keraton di Yogyakarta tetap diakui oleh Republik yang baru dibentuk dengan surat Presiden Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan akhirnya disahkan dengan UU No. 3 Tahun 1950. Pelaksanaan Otonomi Daerah Istimewa berubah dari waktu ke waktu dengan yang paling baru adalah

Dekrit Presiden No. 6 Tahun 1959. Saat ini, Sultan mempunyai jabatan ganda sebagai Kepala Daerah Istimewa Otonom dan Wakil Pemerintah Pusat yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Dalam Negeri. Kesetiaan kepada keraton berarti kesetiaan kepada negara Republik Indonesia karena keduanya adalah bagian yang tidak terpisahkan antara satu lainnya.

Akhir –akhir ini banyak kalangan yang membicarakan mengenai keistimewaan Yogyakarta. Masyarakat Yogyakarta tetap berusaha mempertahankan daerah istimewanya dengan berbagai cara, agar pemerintah nantinya tidak akan mengubah sistem pemerintahan di Yogyakarta yang sejak dari masa presiden Soekarno yang menetapkan secara langsung Sri Sultan Hamengkubuwono dan Paku Alam sebagai gubernur dan wakil gubernur di tetapkan otomatis secara langsung tanpa pemilihan. Tetapi dengan sistem pemerintahan yang ada sekarang mengharuskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur harus di pilih dengan pemilihan, tetapi hal inilah yang membuat warga masyarakat Yogyakarta dan tokoh masyarakat menjadi tidak terima, karena ini menyalahi dengan apa yang telah di berikan oleh Presiden Soekarno kepada Yogyakarta sebagai sebuah penghargaan yang telah memberikan pengaruh cukup besar bagi bangsa Indonesia. Salah satu sisi yang harus menjadi pertimbangan penting dalam pembahasan keistimewaan DIY adalah konteks sejarah yang melatarbelakanginya. Hanya dengan menilik sejarah berdirinya Keraton Yogyakarta dan penggabungannya ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kita akan bisa mendapat gambaran lengkap tentang makna keistimewaan DIY.

Yogyakarta merupakan percontohan dalam pengenalan prosedur demokrasi di tingkat desa. Bagi Yogyakarta, memberikan otoritas kepada masyarakat atau demokratisasi memberikan perubahan sangat mendasar jika dilihat dari konsep otoritas dalam budaya Jawa.

Dalam sejarahnya, masyarakat belum pernah benar-benar terlibat dalam memegang otoritas untuk mengatur tata pemerintahan, baik di Kesultanan maupun Pakualaman. Hak rakyat di pemerintah sangat dibatasi oleh kekuasaan raja yang besar.

Demokratisasi yang berlangsung di Yogyakarta tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Sultan sebagai raja. Boleh dibilang, proses demokratisasi Yogyakarta sangat dipengaruhi sejauh mana Sultan mau melakukannya atau tidak. Menempatkan Sultan sebagai faktor determinan berarti kita melihatnya dalam paradigma doktrin determinisme heroik yang berakar dalam asumsi individualisme dan voluntarisme yang lebih umum. Doktrin ini mengasumsikan bahwa sejarah adalah pengaruh tindakan individu dan sejarah adalah respons atau upaya individu yang paling lunak (*voluntarism*) (Sztompka, 2007: 310).

Sztompka menempatkan individu sebagai katalisator utama, dalam hal ini individu yang besarlah yang mampu melakukan hal istimewa, dalam arti menyebabkan perubahan historis besar. Dengan kata lain, Sztompka menempatkan orang besar sebagai agen perubahan. Dalam perspektif ini, Sultan HB IX sangat relevan untuk ditempatkan pada posisi itu. HB IX adalah motor perubahan di Ngayogyakarta Hadiningrat. HB IX dianggap sebagai individu dengan kualitas pribadinya yang khas (pengetahuan, kecakapan, bakat, keterampilan, kekuatan fisik, kecerdikan ataupun kharisma) bertindak mewakili orang lain atas nama masyarakat Yogyakarta dan untuk kepentingan mereka pula.

Sosok Sultan HB IX ini menarik karena sebenarnya dengan mendeklarasikan diri sebagai bagian dari bayi Republik sama artinya dengan memereteli kekuasaan yang melekat dalam dirinya sebagai sebagai seorang raja absolut. Untuk menjawab keanehan tersebut hendaknya kita melirik perjalanan karier Sultan sebagai seorang bangsawan, terutama aspek

pendidikannya. Sebelum dipanggil pulang pada 1939 ke keraton, HB IX muda adalah mahasiswa di Universitas Leiden. Anak muda yang lahir pada 1912 ini dinobatkan menjadi raja pada 1940 setelah HB VIII wafat tidak lama setelah kedatangan HB IX dari Negeri Belanda. Sejak itulah dia melakukan serangkaian pembaruan (Ricklefs, 1991: 329).

Latar belakang pendidikan modern yang melekat pada sosok elite terpelajar HB IX menjadi dasar bagi lahirnya sebuah perubahan tatanan kenegaraan, termasuk menyangkut cara pandang terhadap modernitas dan kemerdekaan. Moedjanto (1987: 125-127) mencatat sejumlah langkah pembaruan yang dilakukan Sultan muda. Bahkan, HB IX dianggap sudah mempraktikkan demokrasi jauh sebelum orang lain memikirkannya. Tidak lama setelah dilantik pada 18 Maret 1940 dia melakukan setidaknya tujuh hal pokok di keraton. Antara lain (1) penghapusan jabatan patih, sehingga raja bisa berhubungan langsung dengan rakyat; (2) penyederhanaan sejumlah upacara yang memakan biaya besar; (3) membuka kesempatan menjadi pamong praja bagi publik; (4) menghapuskan jabatan wedana yang dianggapnya hanya menjadi penghubung bupati dan *panewu* atau camat; (5) Melibatkan tokoh masyarakat dalam panitia kapanewon; (6) Segera setelah Kemerdekaan diproklamasikan menyesuaikan diri dengan pemerintahan pusat dengan membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah (KNI-D); (7) Menerapkan prinsip kepemimpinan *ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani* dalam kehidupan sehari-hari.

Kesultanan Yogyakarta, pada masa pemerintahan kolonial Belanda mendapat perlakuan khusus, yakni merupakan daerah yang mempunyai kedudukan politik lebih tinggi daripada daerah otonom biasa. Pada masa pemerintahan kolonial, Kasultanan Yogyakarta termasuk negara kecil yang mempunyai kedudukan khusus (Soedarisman, 1984). Dengan

kedudukan yang dimiliki tersebut, Kasultanan Yogyakarta telah memiliki kekuasaan politik yang riil, seperti adanya hak bagi Kasultanan Yogyakarta untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Kedudukan politik tersebut tidak terlepas dari upaya penawaran politik yang dilakukan oleh penguasa kerajaan dengan pemerintah kolonial lewat politik kontrak, yang dilakukan pada tahun 1877, 1921, dan 1940. Pihak pemerintah kolonial Belanda memberikan toleransi kepada Sultan Yogyakarta untuk menjalankan pemerintahan sendiri sesuai dengan hukum adat dengan ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam kontrak politik.

Otoritas Kraton banyak mempengaruhi disetiap lini kehidupan bermasyarakat, yakni terlihat dalam bidang pendidikan, politik dan budaya. Di bidang pendidikan, Sultan membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membiarkan rakyat mendirikan rumah dan hidup di dalam tembok keraton secara magersari. Pendidikan dengan sifat kolonial dihapuskan, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai, yakni mendidik kesederhanaan, hemat, bertanggungjawab, mandiri dan menanamkan rasa kebangsaan dan mempertinggi kebudayaan serta kesenian. Selain itu, Sultan mendorong berdirinya Universitas Gadjah Mada (UGM). Mengenai tempat universitas itu bukan di luar kota, tetapi tepat di bagian depan istananya yakni di Pagelaran Sitinggil. Saat ini, banyak tanah milik keraton yang dipergunakan untuk pendirian sekolah-sekolah. Yogyakarta kemudian berkembang menjadi kota pelajar karena ada berdirinya Tamanan, Kweekschool, Technische School, AMS A, dan UGM. Perkembangan pendidikan ini memunculkan benih-benih pergerakan nasional seperti Kongres Jong Java, Kongres Serikat Islam, Kongres Boedi Oetomo, Kongres Indonesia Muda, Kongres Taman Siswo, Kongres Wanita serta Kongres Muhammadiyah. Pendidikan menjadi motor penggerak yang membawa perubahan sosial dan mobilitas sosial di Yogyakarta.

Peranan Sultan Hamengku Buwana IX dibidang budaya tidak dapat lepas dari kedudukannya sebagai seorang raja yang secara otomatis menjadi pelindung budaya Jawa. Peran Sultan dalam pengembangan budaya Jawa meliputi berbagai fungsi yang terdapat di dalamnya. Sultan mempunyai peranan sebagai pelaku seni, pembina seni, pencipta seni dan pemikir seni (Sudyarsana 1988:6). Sebagai pelaku seni, sejak kecil Sultan Hamengku Buwana IX sudah menerima pendidikan dan pengajaran seni tari Jawa tradisional. Dalam menarikan suatu jenis tarian maka biasanya Sultan berperan sebagai Gatotkaca. Sebagai seorang pembina seni, Sultan melakukan berbagai penyederhanaan dalam bidang kesenian. Akan tetapi, penyederhanaan ini tidak berarti memundurkan kualitas pengembangan seni di Keraton Yogyakarta (Nurtjahjo 1994:19). Sultan Hamengku Buwana IX menciptakan beberapa tarian, antara lain Bedoyo Manten dan Bekso Golek Menak yang kemunculan idenya dipengaruhi oleh wayang dan memiliki unsure -unsur silat Minangkabau. Melestarikan dan membakukan tari adalah sebagian dari sejumlah keinginan Sultan dalam memberi warna baru bagi Keraton Yogyakarta. Ini menunjukkan bahwa keraton menjadi satu pusat kebudayaan yang hidup dan menjadi acuan dinamis untuk kebudayaan dan kesenian. Museum pribadi Sultan Hamengku Buwana IX, Museum Keraton, misalnya, adalah aktualisasi perwujudan keraton sebagai pusat kebudayaan Jawa yang benar-benar hidup (Margantoro 1999:86).

Pandangan dan sikap Sultan Hamengku Buwana IX dibidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya membawa perubahan wujud kebudayaan berupa ide gagasan mengenai sistem pemerintahan feodal berubah menjadi demokrasi. Keterlibatan Sultan dalam perjuangan kemerdekaan dan keputusannya memasukan keraton dalam kedaulatan RI memberi contoh kepada rakyat mengenai jiwa nasionalisme. Sultan mengubah dan menyederhanakan sistem

pemerintahan dengan mengambil alih fungsi Patih Dalem dan membentuk Dewan Kementrian, membentuk panitia pembantu pamong praja sebagai badan pertimbangan, dan mengadakan ujian saringan bagi mereka yang ingin menjadi pegawai keraton. Tindakan Sultan ini menunjukkan bahwa masyarakat luas boleh mengambil bagian dalam pemerintahan keraton. Hal ini membuat gerak masyarakat ningrat menjadi terbatas. Masyarakat ningrat diharapkan berbaur dengan masyarakat luas dan tidak ada lagi hak istimewa dan perlakuan hukum istimewa yang diatur seperti dalam perjanjian dengan Belanda sebelumnya. Usaha yang dilakukan Sultan Hamengku Buwana IX untuk menghemat biaya pengeluaran keraton yakni dengan menyederhanakan sebagian upacara-upacara ritual keraton, sebagian yang lain tetap dijaga keasliannya, terutama untuk tradisi keraton yang fundamental. Sultan mengubah gagasan lama yang dirasa tidak sejalan dengan semangat budaya baru yang berwawasan nasional. Misalnya, menggunakan bahasa Jawa Bagongan di lingkungan keraton dan bahasa Indonesia dalam urusan kenegaraan. Perubahan ini menunjukkan peningkatan kesadaran nasionalisme berbangsa dan bernegara, dengan tetap menjaga keluhuran nilai budaya Jawa.

Paparan di atas menunjukkan bahwa keberpihakan Sultan kepada rakyat turut menjadi akselerator proses demokratisasi di Yogyakarta pada awal kemerdekaan. Dua hal yang patut dicermati adalah pemilihan untuk bergabung dengan Republik dan pemangkasan birokrasi kerajaan. Di sini Sultan berani melakukan reformasi birokrasi dari aristokrasi yang berpusat kepada kekuasaan tradisional menjadi birokrasi modern. Pendidikan Barat HB IX turut memberikan pengaruh Weber dalam rasionalisasi birokrasi. Ritzer (2007: 37) menjelaskan, teori birokrasi modern yang dikembangkan Weber menunjukkan adanya hierarki jabatan-jabatan, perbedaan pribadi dan jabatan, pertimbangan kompetensi pejabat. Dalam Undang-

Undang No.13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY pasal 42 ayat 1 menyebutkan bahwa Pemerintah pusat menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 dalam APBN sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan Negara.

Saat ini keistimewaan DIY diatur dengan Undang-Undang yang menempatkan Sultan Hamengku Buwono X sebagai raja sekaligus Gubernur DIY melalui penetapan. Namun nilai kharismanya lebih rendah dibandingkan dengan Sultan Hamnegku Buwono IX.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Otoritas Kesultanan Yogyakarta dalam mempengaruhi sistem Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Otoritas Kesultanan Yogyakarta dalam mempengaruhi sistem Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menggambarkan tentang Otoritas Kesultanan Yogyakarta dalam mempengaruhi sistem Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis



pada orang Yogyakarta asli dan pendatang yang telah menyatu secara kultural dengan kraton.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Sultan dapat menjaga nilai-nilai tradisi dan tidak terpengaruh oleh arus modernisasi sehingga Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menjadi *icon* Kota budaya yang banyak diminati turis asing karena nilai tradisionalnya masih terjaga.
2. Diharapkan pada perayaan Sekaten tidak ada lagi sewa kavling sehingga pedagang dari kalangan menengah bawah dapat berdagang di halaman alun-alun. Sehingga perayaan Sekaten juga menjadi ajang untuk menjaga nilai-nilai tradisionalnya.
3. Diharapkan bangunan-bangunan megah seperti apartemen dan mall dapat dikurangi keberadaannya karena dapat mempengaruhi estetika Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Anderson, Bernet. (2006). Bahasa, dan Kekuatan: menjelajahi politik di Indonesia. Jakarta: Equinox Publishing

Atmakusumah (ed). (1982) Tahta Untuk Rakyat: Celah - celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX. Jakarta: PT. Gramedia.

Daliman (2001) Makna Simbolik Nilai - nilai Kultural Edukatif Bangunan Keraton Yogyakarta: Suatu Analisis Numerologis dan Etimologis.

Endraswara (2006) Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan: Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.

- Goenawan R & Darto H (1993) *Sejarah Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta: Mobilitas Sosial DIY Periode Awal Abad 20*. Jakarta: Depdikbud.
- Gauthama. (2003). *Budaya Jawadan Masyarakat Modern*. Jakarta: P2KTPW BPPT
- Kartodirdjo (1982) *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Kedaulatan Rakyat (1988) *Sri Sultan Banyak Berjasa Dalam Pengembangan Agama*.
- Koentjaraningrat. (1990). *Pengantar Antropologi*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Kuntowijoyo. (2006). *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta : Tiara Wacana
- Khairuddin (1995) *Filsafat Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Suseno (2001) *Etika Jawa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Margantoro YB, RPA Suryanto S, Baskoro M, Agoes W, dan Ali S (1999) *Sri Sultan Hamengku Buwana X: Meneguhkan Tahta Untuk Rakyat*, Jakarta: Grasindo.
- Nurtjahjo LA (1994) *Peranan Sri Sultan Hamengku Buwana IX Pada Masa Orde Baru*. Laporan Penelitian. Jakarta: Proyek Penulisan Biografi Pahlawan Nasional, Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Sindhunata (1999) *Kata Pengantar. Dalam Sri Sultan Hamengku Buwana X, Bercermin di Kalbu Rakyat*. Kanisius: Yogyakarta.
- Subanar GB (2006) *Manunggaling Kawula-Gusti Dalam Transisi*. Dalam: I Wibowo & Herry Priyono (eds). *Esai-esai untuk Franz Magnis-Suseno: Sesudah Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius. 59-86.
- Sudyarsana HK (1988) *Sri Sultan Hamengku Buwana IX sebagai Seniman dan Pemikir Seni*. Kedaulatan Rakyat. 18 Oktober 1988.
- Soemardjan (1991) *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Soedarisman (1984) Kasultanan Yogyakarta : Gadjah Mada university Press

Sztompka (2007) Doktrin Demokratisasi : Gadjah Mada University Press

Suwarno (1994) Sultan HemengkuBuwana IX danSistemBirokrasiPemerintahan Yogyakarta

### **Peraturanperundang-undangan**

Undang-Undang No.13 tahun 2012 tentangKeistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

### **SumberInternet :**

*www.sejarahjogja.com*